

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa harus mengurangi ataupun mengorbankan segala kebutuhan di generasi yang akan datang dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diartikan juga bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan mutu sekaligus kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia bisa diartikan sebagai perhitungan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan pula sebagai upaya dalam maksud memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan sebaik mungkin (Hadiwijoyo, Suryo Sakti; Anisa, Fahima Diah, 2019).

Pembangunan berkelanjutan adalah hasil produk modernisasi yang perkembangannya dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Modernisasi adalah suatu proses perubahan individu dengan gaya hidup tradisional merujuk ke suatu cara hidup yang lebih bertaut, apabila ditelaah dari perkembangan teknologi tentunya terlihat lebih maju dan lebih cepat. Hal – hal ini ditandai

dengan keberhasilan dari pemulihan Eropa pasca perang dengan proyek *Marshall Plan* dan menjadikan pembangunan sebagai sebuah alternatif dan mekanisme yang wajib diadopsi oleh negara *postcolonial* bahkan menjadi tren yang lebih global. (Hadiwijoyo & Anisa, *SDGs Paradigma Baru Pembangunan Global*, 2019)

Berbagai perdebatan muncul dalam selang waktu beberapa dekade proyek pembangunan sudah berjalan namun ditemukan banyak ketidaksesuaian porsi dan tumpang tindih yang muncul dalam implementasinya. Kelaparan, kemiskinan, kekerasan, hingga kerusakan lingkungan menjadi bagian yang terus melekat pada negara – negara terbelakang dan negara – negara yang berkembang. Keadaan dan kondisi tersebut memunculkan banyaknya kritikan atas pemahaman dan proyeksi pembangunan, salah satunya digunjingkan kembali mengenai nilai- nilai dan etika yang ada di dalam sebuah mekanisme pelaksanaan proyek – proyek pembangunan (Hadiwijoyo, Sari, Anisa, & Nanda, 2019).

Berdasarkan laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimunculkan pada tahun 1987 adanya kerangka berpikir dasar mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu tidak saja pada pembangunan yang menunjukkan kepada akibat akhirnya saja melainkan ada manfaat membentuk sebuah kawasan secara holistik yang seharusnya mencakup juga aspek sosial dan lingkungan. Kerangka berpikir pembangunan berkelanjutan sebenarnya adalah hubungan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

hidup. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, perolehan resolusi ekonomi harus tegak lurus dengan tujuan sosial ataupun kepentingan lingkungan. Kemunculan pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma baru pembangunan global adalah beberapa dari salah satu usaha melanjutkan cakupan yang lebih luas, poin target yang lebih nyata, tentunya dengan memperkuat keterlibatan atau peran serta aktor di luar negara (*non-state actor*) dan hal ini adalah usaha merealisasikan pembangunan berkelanjutan sebagai tanggung jawab bersama – sama (WCED, 1987).

Pembangunan berkelanjutan itu sendiri terbagi menjadi empat pilar pokok yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Masing - masing pilar memuat beberapa penerapan 17 (tujuh belas) tujuan yang sudah disepadankan dengan pengelompokan tujuan – tujuan dalam keempat pilar pembangunan berkelanjutan tersebut yang salah satunya adalah mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang layak yaitu tujuan di nomor enam (Hadiwijoyo, Sari, Anisa, & Nanda, 2019).

Tujuan ke enam dari pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau serta pemenuhan kebutuhan terhadap akses sanitasi yang layak dan adil untuk semua kalangan masyarakat (Bappenas, 2021).

Generasi muda adalah sumber insani untuk pembangunan terutama pembangunan berkelanjutan serta sebagai generasi penerus cita – cita bangsa. Pemuda dianalogikan sebagai satu mata rantai yang terurai panjang dan posisi generasi muda khususnya pemuda itu sendiri di dalam masyarakat global menduduki mata rantai yang paling fundamental dan memiliki peran dalam meneruskan cita – cita perjuangan bangsa yang telah diposisikan oleh generasi sebelumnya dan berkapabilitas untuk menempatkan dan mengembangkan kemerdekaan (Noer, A, & Ahmad, 2000).

Pembangunan berkelanjutan dengan studi kasus peran organisasi pemuda internasional dalam usaha penyediaan serta pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan melalui *Junior Chamber International (JCI)* di Indonesia bertujuan agar tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur secara luas baik dari sisi materil maupun spiritual atas dasar Pancasila. Agar tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini dibutuhkan tiga sumber utama yaitu sumber alam, sumber dana, dan sumber insani yaitu pemuda itu sendiri (Bappenas, 2021).

Harus diakui pemuda sebagai kaum insani yang memiliki nilai potensial bagi pembangunan berkelanjutan menempati lapisan terbesar dalam masyarakat. Sumber ini tidak akan pernah habis dan merupakan suatu kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Pemuda akan memiliki nilai – nilai lebih apabila disiapkan sebagai pemimpin pembangunan. Dari asumsi inilah pengembangan pemuda dirasa perlu untuk menuju kepada

penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan kerja dan hal tersebut bisa menjadi pasokan untuk semua pemuda agar semakin memberikan nilai - nilai dalam proses pembangunan global (Noer, A, & Ahmad, 2000).

JCI Indonesia merupakan suatu organisasi nasional pemuda yang non - politik bahkan bisa dikatakan sebagai suatu organisasi kepemudaan internasional terbesar di dunia dan mitra daripada Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yaitu *Junior Chamber International*. *Junior Chamber International* ini adalah komunitas internasional yang berumur dari 18 hingga 40 tahun dan memiliki resolusi untuk membuat transformasi positif di seluruh dunia (JCI, 2018).

Profil keanggotaan JCI itu sendiri menyentuh usia 18 sampai 40 tahun yang kebanyakan terdiri dari mahasiswa, eksekutif muda, dan profesional. Bermula dari tahun 1970-an Indonesia telah memulai interaksi dan meningkatkan keaktifan JCI itu sendiri. Namun sempat pasif selama beberapa tahun dan JCI Indonesia pun kembali berpijak di tahun 1988 yang pada saat itu dipimpin oleh Cicip Sutarjo. Perkanchan JCI Indonesia telah melenggang ke - 27 (dua puluh tujuh) kota serta provinsi di Indonesia. Selain itu, JCI Indonesia sendiri telah meluaskan Gerakan “*Indonesia Goes Global*” yang bermaksud memotivasi kaum pemuda Indonesia agar aktif ikut bergerak dalam globalisasi dengan motto “*Global Citizens, Global Actors, Global Power*” (JCI, 2018).

Dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan ke enam yaitu menjamin ketersediaan serta manajemen air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua kalangan masyarakat, JCI Indonesia sebagai wadah melalui peran pemuda sudah melakukan beberapa kegiatan di lapangan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan yang pertama berupa memberikan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih kepada kelompok warga Cilincing yang kurang mampu dipadu dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manajemen serta akses air bersih dan sanitasi yang layak. Kedua, pemberian air bersih layak minum serta pemberian cenderamata berupa botol air kepada guru – guru dan para murid sekolah dasar di daerah Papanggo – Jakarta Utara dipadu dengan sosialisasi mengenai manajemen serta akses air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.

Peran pemuda tentunya memiliki potensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan tujuan keenam yaitu menjamin ketersediaan serta manajemen air bersih dan sanitasi yang layak khususnya di Indonesia namun lebih bijaksana bila kita melihat terlebih dahulu gambaran yang berkenaan dengan kondisi sanitasi di Indonesia secara umum.

Dari kutipan (WHO) *World Health Organization* berdasarkan data STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kementerian Kesehatan, Indonesia berada di angka 78,80% dan hal ini menggambarkan jika angka itu masih terlalu jauh dari target negara berkenaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu 100% akses sanitasi dan air minum layak di tahun 2030. Gambaran tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua terburuk di dunia untuk permasalahan buang air besar sembarangan dan hal ini menunjukkan kalau keadaan sanitasi dari akses hingga perilaku sanitasi warganya bisa dikatakan jauh dari layak (Herman, 2021).

Tentunya dengan gambaran tersebut, dibutuhkan juga adanya kesinambungan pengelolaan sumber daya air yang bersinergi dari pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang sudah dirumuskan berkenaan dengan pengelolaan sumber daya air dan sanitasi yang dirumuskan di tingkat nasional. Mengenai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan air dan sanitasi di tingkat pusat pemerintahan, mereka membaginya dalam skala tanggung jawab dan kewenangan. (Elysia, 2018)

Seperti halnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai wewenang dalam menyusun kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur yang terkait air dan sanitasi. Lalu Kementerian Kesehatan yang memiliki pondasi tanggung jawab dalam segala aspek keterkaitan dengan kualitas air. Dilanjutkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewajiban untuk meregulasi pengaturan air kemasan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) juga memiliki tanggung jawab untuk membuat rencana investasi. (Elysia, 2018)

Selain itu pula dibuatkan suatu wadah komunikasi dan koordinasi supaya akses air minum dan sanitasi bisa berlangsung dengan lebih baik dalam bentuk 162 Seminar Nasional FMIPA dari Universitas Terbuka pada tahun 2018 yang sering disebut Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Pokja AMPL Nasional ini sendiri tergabung dari delapan Kementerian yang terkait yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat sebelumnya telah menerapkan keterkaitan dengan pemerintah daerah dalam bentuk garis – garis koordinasi melalui kementerian – kementerian terkait yang menjembatani pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam penanganan ketersediaan air bersih dan sanitasi. (Elysia, 2018)

Tapi pada implementasinya belum terlihat adanya peningkatan dari kualitas layanan yang signifikan. Ada probabilitas yang terjadi perihal tersebut tidak memiliki signifikansi dengan baik karena pendelegasian tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak diikuti dengan sistem alur dana yang mencukupi di dalam penerapannya. Padahal untuk ketersediaan air bersih, tertuang kewajiban dalam pemberian layanan air bersih yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurut UU No.



22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, peran pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi sebagai pemilik PDAM dalam manajemen PDAM menjadi lebih besar ketimbang sebelum diberlakukannya oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.(Elysia, 2018).

Permasalahan yang berhubungan dengan sanitasi bisa dikatakan sebagai masalah yang fundamental sekaligus rumit karena bukan hanya memunculkan permasalahan lingkungan dan kesehatan saja, perilaku masyarakat yang kurang baik dengan keterbatasan akses sanitasi mampu berimplikasi pada banyak hal. Mulai dari masalah sosial hingga kualitas sumber daya manusia negara terdampak oleh sanitasi yang buruk. Penyelesaian persoalan ini pun tidak mudah karena akses sanitasi yang layak serta aman harus diusahakan semaksimal mungkin. Disinilah peran pemuda yang digadang – gadang sebagai generasi penerus bangsa dan pemilik masa depan sudah seyogyanya mengambil peran karena akses air bersih dan sanitasi merupakan tanggung jawab semua pihak melalui pendekatan multi sektor.

Berdasarkan latar belakang diatas, sudah terlihat bahwa fenomena tersebut signifikan untuk dianalisa dari perspektif Studi Hubungan Internasional. karena peran pemuda melalui JCI Indonesia merupakan penggambaran peranan aktor non-negara dan juga JCI sebagai organisasi internasional, disamping isu lingkungan hidup adalah bagian dari *low politics* atau politik yang cenderung hanya memikirkan bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta mencapai kepentingan

pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan aspek moralitas dalam perjuangannya.

Kemudian seiring dengan kemajuan Studi Hubungan Internasional dan terakhir dari ragam hubungan fenomena ini berpola pada hubungan kerjasama yang tersentralisasi pada isu lingkungan hidup terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tujuan keenam yaitu memastikan ketersediaan serta manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi yang layak untuk semua lapisan masyarakat. Ketertarikan peneliti diwujudkan dengan mengambil judul penelitian: “Peran Organisasi Internasional dalam Penyediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan: Studi Kasus *Junior Chamber International* Indonesia”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dengan menggunakan JCI sebagai studi kasus di Indonesia memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengapa JCI memprioritaskan air bersih dan sanitasi dalam tujuan pembangunan global?
- 2) Bagaimana peran JCI dalam usaha penyediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui peran organisasi internasional kepemudaan seperti JCI mewujudkan prioritas tujuan pembangunan

berkelanjutan 6 pada sektor lingkungan hidup dalam memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

- 2) Untuk menjelaskan kajian program – program JCI di Indonesia dalam usaha penyediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan para pembaca baik dari golongan mahasiswa bidang hubungan internasional, terutama yang membahas tentang organisasi internasional kepemudaan maupun pemerhati isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan bagi pembaca umum sebagai referensi dalam menyikapi pentingnya kesadaran penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Dari uraian manfaat diatas maka peneliti mencoba untuk menjabarkan dalam beberapa sub-bab yang berkesinambungan yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konsep, metodologi, pembahasan hingga kesimpulan.